



Merayakan Keberagaman dan Membangun Kekuatan Bersama: Agenda Memperkuat Ekosistem Masyarakat Indonesia

Diseminasi Indeks Keberlanjutan OMS Indonesia 2023 dan Diskusi Publik "Resiliensi OMS di Tengah Penyempitan Ruang Sipil" 5 Agustus 2024

> Riza Imaduddin Abdali Civil Society Advocacy Specialist YAPPIKA Pengelola Koalisi Kebebasan Berserikat







Resiliensi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia

LINGKUNGAN HUKUM (4,8)

- 1. Pendaftaran
 - 2. Operasi
- 3. Pelanggaran Negara
- 4. Perpajakan
- 5. Akses Sumber Daya
 - 6. Kapasitas Hukum Lokal



CITRA PUBLIK (4,0)

- 1. Pemberitaan media
 - 2. Persepsi Masyarakat
- 3. Persepsi Dunia Usaha
 - 4. Hubungan Masyarakat
 - 5. Peraturan
 Internal
 Organisasi

Resiliensi OMS
(CIVICUS):
berbagai faktor
penyempitan
ruang sipil +
kerentanan
kapasitas internal
OMS untuk
menjalankan
perannya



Resiliensi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia

Berkembangnya disinformasi dan hoax, termasuk stigmatisasi OMS populis, Tekanan yang meningkat pada media untuk membatasi kritik

Organisasi Masyarakat Sipil

Terputusnya hubungan

dengan komunitas

Cyber troops yang dikuasasi oleh elite politik dan ekonomi

Penyempitan ruang

Mobilisasi populis, berkembangan intoleransi, dan menguatnya sektarianisme

Pengaruh jaringan yang lemah

Kurangnya kepemimpinan yang adaptif, inklusif, dan menjembatani antar generasi Represi dan
serangan secara
langsung terhadap
OMS dan aktivis

Pembubaran OMS

tanpa melalui

proses peradilan

Pengawasan berlebihan untuk akses pendanaan

Lemahnya sistem SDM berbasis kompetensi (regenerasi kepemimpinan)

Perhatian yang terbatas

pada komunikasi

Model pendanaan yang konvensional

Lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan staf (well-being)

Kewajiban mendaftar SKT

Penggelembungan kekuasaan eksekutif untuk membungkam kritik dan menekan oposisi

Lemahnya kapasitas transformasional

Kerangka hukum berorganisasi tidak kondusif







Tantangan Kerangka Hukum Pengaturan OMS di Indonesia

Paradigma Pemerintah Indonesia yang menganggap OMS adalah ancaman dan bukan sebagai aktor demokrasi. Salah satu alasan pengesahan UU Ormas dari masa ke masa adalah meningkatnya ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik, keamanan nasional, dan moralitas masyarakat oleh organisasi-organisasi berbasis keagamaan

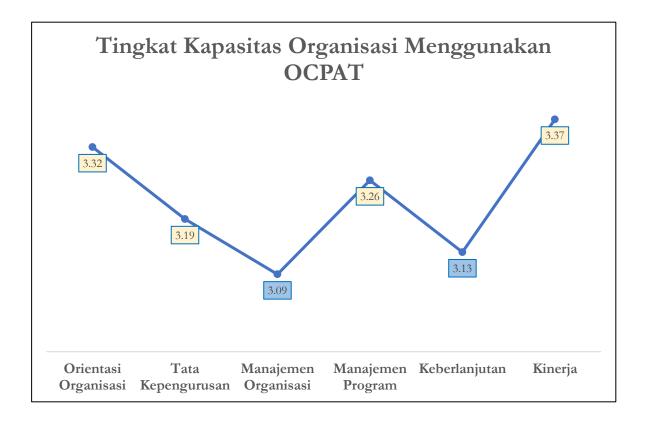
Adanya hegemoni tafsir Ormas dari Pemerintah Orde Baru hingga Reformasi dengan cara yang berbeda Mewajibakan OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT organisasi bagi yang telah kedaluwarsa

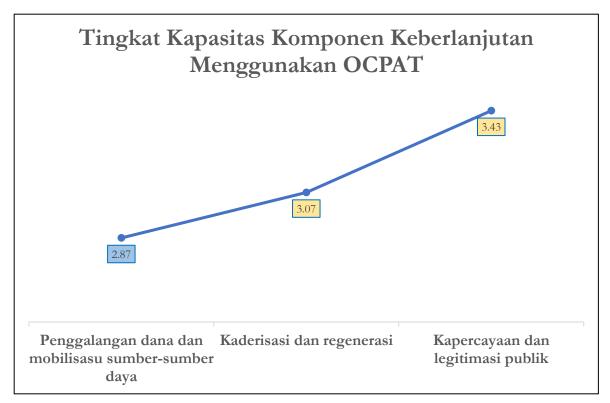
Menjadikan SKT sebagai alat untuk pembatasan akses terhadap sumber daya

Pengawasan yang berlebihan dengan pendekatan politik keamanan Pembubaran OMS tanpa melalui proses peradilan melalui asas contrarius actus dan sanksi pidana bagi anggota/staf/pegiat OMS



Status Kapasitas OMS











Tantangan Penggalangan Dana Publik di Indonesia

Kedermawanan masyarakat Indonesia yang tinggi, tetapi masyarakat dalam berbuat baik masih sulit Perkembangan teknologi yang pesat dan mekanisme penyelenggaraan sumbangan yang beragam

Paradigma kebijakan penyelenggaraan sumbangan masih meletakkan pada karitatif Rezim perizinan PUB yang birokratis dan berjenjang dengan jangka waktu yang pendek dan bersifat short term

Inkonsistensi pelayanan perizinan PUB Ketidakjelasan dan minimnya jumlah biaya operasional untuk penyelenggara sumbangan Mengabaikan dan mematikan inisiatif penyelenggaran sumbangan yang dilakukan oleh individu, komunitas, dan perusahaan

Tidak adanya pengaturan mengenai pelindungan donatur

Adanya sanksi pindana yang berpotensi mengkriminalisasi penyelenggara sumbangan

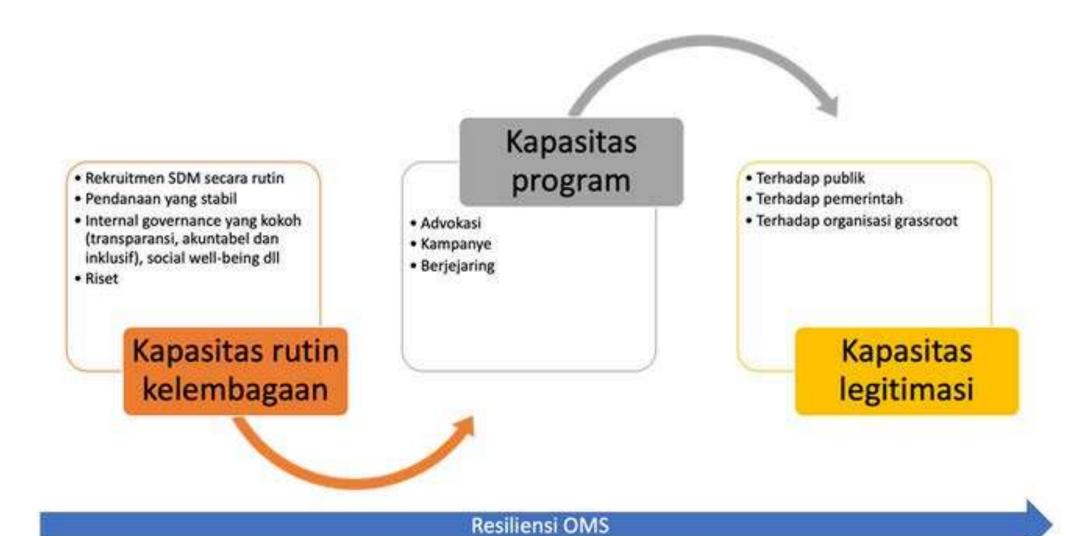
Kebijakan antar kementerian yang tidak sinkron dan tumpang tindih







Faktor Pendukung Resiliensi OMS di Indonesia





Faktor Pendukung Resiliensi Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia

- Adanya perasaan senasib, termasuk memperkuat dan memperluas jaringan masyarakat sipil lokal, nasional, dan regional. Isu-isu publik yang menjadi diskursus memperlihatkan bahwa hal-hal yang sangat dekat dengan masyarakat dapat menciptakan pengalaman langsung dan kesadaran subjektif atas adanya realitas ancaman dalam bentuk penindasan atau ketidakadilan.
- Cara penyampaian dan medium. Pengemasan isu secara ringan dan medium yang intensif sangat penting dalam proses perluasan gerakan masyarakat sipil. Kedua unsur yang tidak terpisahkan ini berperan dalam mempercepat adanya "the mild voice of reason", dimana masyarakat sipil mendapatkan perspektif yang masuk akal terhadap suatu situasi yang mengancam.
- Inklusivitas dan kolektivisme, termasuk mengoptimalkan peran orang muda dalam gerakan masyarakat sipil. Pendekatan yang lebih mengarah pada interseksionalitas dengan latar belakang keberagaman lebih dapat membuka peluang diterima oleh masyarakat dengan tetap membawa misi-misi aktivisme dalam membela hak asasi manusia, demokrasi, dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat sipil.
- Pembagian peran dalam gerakan masyarakat sipil, termasuk kepemimpinan strategis dalam masyarakat sipil. Faktor lain yang mendukung resiliensi gerakan masyarakat sipil adalah adanya pembagian peran dalam gerakan (self-organizing civil society).







Potensi Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil Indonesia

Tingginya kedermawanan dan partisipasi politik kewargaan, baik secara individu maupun kelompok

Keberagaman strategi
OMS dalam
mewujudkan demokrasi
substantif di Indonesia

Terbentuk, menguat, dan meluasnya jaringan masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi Indonesia

Gerakan orang muda dapat menjadi inspirasi perluasan basis OMS di Indonesia Adanya mekanisme regenerasi dan kaderisasi di internal masyarakat sipil Kampus dan civitas akademika sebagai salah satu pilar penting dalam masyarakat sipil

Berkembangnya media alternatif yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan dan terpinggirkan

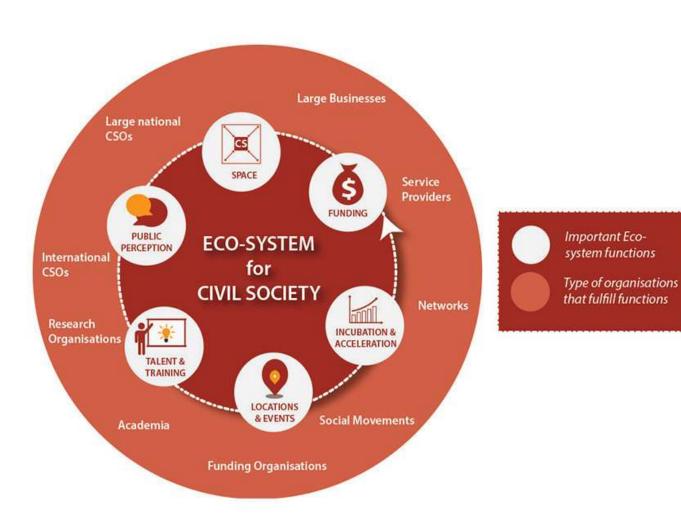
Adanya rancangan tekonokratik pembangunan bidang demokrasi difokuskan pada tiga ranah meliputi masyarakat sipil, komunikasi publik, dan lembaga demokrasi







Agenda ke Depan: Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil Indonesia



- Memberi perhatian lebih besar untuk menguatkan berbagai kapasitas internal OMS:
 - Perlu strategi lebih inovatif dengan menggunakan ekosistem masyarakat sipil
 - Alokasi pendanaan → Institusi donor perlu memberikan alokasi khusus untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, bukan hanya teknikal program, termasuk dalam memperkuat ekosistem masyarakat sipil.
 - Menumbuhkan dan menguatkan infrastruktur sektoral (supporting infrastruktur) → grant intermediaries, penyedia kapasitas, penyedia pengetahuan/riset, penyedia bantuan hukum, dan penyedia konseling.
- Memperkuat dan memperluas jaringan masyarakat sipil untuk memperbaiki kebijakan yang lebih kondusif bagi ruang sipil dan masyarakat sipil Indonesia



Membuat Perubahan Menjadi Nyata

A JI. Basuki Rahmat RT 006 RW 010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA), Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410

E office@yappika-actionaid.or.id

yappika-actionaid.or.id

(o) @yappikaactionaid

yappika @yappika

Yappika-ActionAid

